

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan asosiasi kelompok yang melakukan kerjasama secara regional yang terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand yang awalnya didirikan oleh lima negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Keanggotaan ASEAN terus bertambah dari tahun 1984-1999 menjadi sepuluh negara anggota yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam pada tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, Laos pada tahun 1997, Myanmar pada tahun 1997, dan Kamboja pada tahun 1999 yang menjadi anggota ASEAN terakhir. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang strategis baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Pembentukan MEA ini bertujuan agar negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat menjadi “*key player*” didalam “*global chain production*”, dapat memperkuat posisi Negara-negara ASEAN di dalam negosiasi internasional, dan dapat melakukan percepatan stabilitas perekonomian di negara masing-masing sehingga kedepannya Negara-negara ASEAN diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah ekonomi antar negara ASEAN dan nantinya para anggota ASEAN dapat bersaing dengan negara China dan India yang saat ini telah menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Benua Asia. Kesepakatan MEA tersebut mengakibatkan adanya beberapa konsekuensi yang harus diterima oleh anggota ASEAN antara lain adanya aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa investasi, tenaga kerja yang terampil, dan modal. Faktor-faktor itu tentunya dapat berdampak positif maupun negatif bagi perekonomian di negara-negara Asia Tenggara terutama Indonesia (Muzarlis, Efni, dan Savitri, 2016).

Langkah awal dari pelaksanaan MEA dengan ekonomi yang terintegrasi dimulai pada tahun 2015 sehingga integrasi kekuatan ekonomi di kawasan ASEAN ini diharapkan mampu mengimbangi bahkan melebihi kekuatan ekonomi negara lainnya (seperti China dan India) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing negara ASEAN pada tahun 2020 (Silalahi, 2015). Oleh karena itu, Indonesia harus segera mempersiapkan diri dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada terutama kinerja keuangan bank sebelum dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dibidang keuangan dan perbankan pada tahun 2020 .

Peluang Indonesia untuk bersaing di pasar bebas ASEAN cukup besar. Dalam memanfaatkan peluang di bidang investasi, Negara ASEAN membutuhkan dana cukup besar yang digunakan untuk mendukung investasi yang akan dilakukan. Dana yang dibutuhkan bisa berasal dari modal pribadi maupun modal dari pihak lain seperti bank. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menjadi perantara yang mempunyai peran besar dalam menggerakkan sektor riil. Kondisi bank yang tidak stabil tentu dapat memberikan dampak yang buruk bagi sektor ekonomi. Bank Sentral di masing-masing negara ASEAN terus melakukan berbagai upaya berupa pengawasan dan pembaharuan regulasi untuk mendorong kinerja keuangan industri perbankan selalu dalam keadaan sehat (Muzarlis, Efni, dan Savitri, 2016).

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Perbankan memiliki peran besar dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional di suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya memiliki dua tujuan yaitu perbankan menjadi penyedia jasa alat pembayaran yang efisien bagi nasabah dan perbankan menjadi wadah untuk menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya atau menyalurkan kembali dana

tersebut kepada nasabah yang membutuhkan dana (Muzarlis, Efni, dan Savitri, 2016).

Namun, Segala bentuk usaha pasti memiliki kompetitor atau pesaing termasuk perbankan. Dengan dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di bidang keuangan dan perbankan pada tahun 2020, Bank dalam negeri dituntut untuk terus bersaing dengan Bank Asing yang beroperasi di Indonesia dan terus berusaha menarik minat para calon deposan (nasabah) agar calon nasabah tertarik untuk menempatkan dananya pada bank dalam negeri baik pada Bank Umum Milik Negara maupun Bank Umum Milik Swasta. Selain itu, Bank Asing sebagai pesaing bank dalam negeri juga terus melakukan berbagai upaya untuk menarik minat para calon deposan (nasabah) dalam negeri. Oleh karena itu, Bank dalam negeri harus dapat mengatur strategi atau memiliki strategi khusus agar nasabah dalam negeri lebih banyak menginvestasikan dananya pada Bank Nasional daripada Bank Asing (Muzarlis, Efni, dan Savitri, 2016). Selain itu, Bank Nasional juga harus memenuhi beberapa persyaratan agar bank dapat sukses melakukan ekspansi di negara ASEAN lainnya antara lain bank harus memiliki modal yang kuat dan sehat, memperhatikan dan memenuhi peraturan yang ada di negara lain, serta memiliki pangsa pasar yang besar di negara asal agar bank lebih mudah diterima di negara lain.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun kebijakan mengenai ketahanan dan daya saing perbankan nasional. Deputi Komisioner bidang Pengawasan Perbankan OJK, Mulya E Siregar mengatakan bahwa kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan sistem perbankan yang efisien, sehat, dan stabil. Ada tiga aspek penting yang akan difokuskan dalam kebijakan ini antara lain aspek efisiensi dan kontribusi terhadap perekonomian, aspek *governance* untuk mengurangi risiko, dan aspek kapasitas permodalan (kecukupan permodalan). *Financial Services Partner* PwC Indonesia, M Jusuf Wibisana, mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam pengelolaan risiko perbankan di Indonesia pada tahun 2014 ada pada

risiko kredit dan risiko likuiditas. Hasil dari pernyataan tentang tantangan tersebut diperoleh PwC dari hasil surveinya (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Selain itu, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Irwan Lubis mengatakan bahwa perbankan nasional perlu untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja bank dari segi permodalan dalam menghadapi pasar bebas ASEAN di sektor perbankan agar bank tidak kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan Bank Asing. Bank Asing akan lebih banyak melakukan ekspansi dan bank akan memilih pangsa pasar yang tidak pernah dijangkau oleh Bank Nasional di Indonesia sebelumnya. Salah satu hal yang menjadi kelemahan Bank Nasional dalam bersaing dengan Bank Asing adalah tingkat suku bunga kredit yang masih tinggi dibandingkan Bank Asing terutama Bank di negara ASEAN lainnya (Melani, 2015).

Perusahaan (perbankan) di Indonesia, terutama yang sudah banyak melakukan kegiatan di pasar modal, diharapkan mampu menerapkan *good corporate governance* (GCG) sesegera mungkin. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai GCG sebagai pedoman perusahaan publik. Menurut Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Maryono, Penerapan harus diterapkan pada tingkat Nasional dan Internasional karena hanya terdapat 2 perusahaan publik yang masuk dalam *ASEAN Corporate Governance and Award*. Hal ini berbanding terbalik dengan negara-negara ASEAN lainnya antara lain Thailand yang mampu mewakilkan 8 perusahaan, Filipina dengan mewakilkan 11 perusahaan, Singapura dengan 8 perusahaan, dan Malaysia dengan 6 perusahaan. Perusahaan di Indonesia diharapkan dapat lebih baik dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG sehingga perbankan Indonesia dapat meraih penghargaan lebih banyak lagi pada indikator GCG di tingkat ASEAN. Oleh karena itu, Perusahaan publik di Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi agar pelaksanaan GCG dapat berjalan dengan baik pada tingkat Nasional maupun Internasional (Yoga, 2015).

Perbankan Indonesia akan terus dituntut untuk bisa bersaing dengan Bank Asing seperti Maybank dan DBS yang memiliki modal dan aset yang jauh lebih besar dibandingkan Bank Nasional di Indonesia (Kelana, 2014). Selain itu, Laba perusahaan juga harus ditingkatkan agar Bank Nasional dapat lebih banyak melakukan ekspansi baik di Indonesia maupun di negara ASEAN lainnya. Pada awal tahun 2018, kinerja perbankan mencatat pertumbuhan cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari hasil laporan kinerja 10 bank besar per Februari 2018 antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Panin, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Danamon, dan Maybank Indonesia. Laba bersih 10 bank besar tersebut meningkat 12,45% per Februari 2018 mencapai Rp 15,27 triliun. Kenaikan laba bersih tersebut dikarenakan adanya kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 3,34% menjadi Rp 38,69 triliun. Kenaikan pendapatan bunga bersih ini dikarenakan adanya kenaikan kredit sebesar 8,07% mencapai Rp 2.902 triliun. Selain itu, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank juga meningkat sebesar 0,45% mencapai Rp 116,1 triliun (Rahmawati, 2018).

Sedangkan, Salah satu Bank Asing yaitu Citibank Indonesia mencatatkan pertumbuhan kredit yang cukup tinggi pada 6 bulan pertama di tahun 2018 sebesar 19% yang mencapai Rp 47,5 triliun. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Citibank juga mengalami peningkatan sebesar 15% yang mencapai Rp 58,25 triliun. Adanya pertumbuhan kredit dan DPK yang tinggi mengakibatkan laba bersih yang dihasilkan Citibank mengalami penurunan sebesar 36% menjadi Rp 835 miliar (Rahmawati, 2018). Berdasarkan keterangan tersebut, Bank Asing memiliki laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan Bank Nasional dan Bank Campuran di Indonesia.

Dalam menghadapi MEA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan pemberian insentif berupa kemudahan membuka jaringan kantor bagi bank yang dapat meningkatkan efisiensinya. Ukuran efisiensi tersebut dapat dilihat dari rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Margin Bunga Bersih (*Net Interest*

Margin/NIM). Peraturan itu merupakan pengembangan dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum berdasarkan Modal Inti. Dalam SE tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bank dalam melakukan pembukaan jaringan kantor. Syarat itu adalah *back up* modal atau alokasi modal inti. Prinsipnya adalah setiap bank yang akan membuka jaringan kantor, bank tersebut harus meningkatkan modal intinya terlebih dahulu. Modal inti adalah modal yang berasal dari setoran pemegang saham dan laba ditahan. Ekspansi jaringan dikaitkan dengan modal agar bank memiliki rasa kehati-hatian. Dengan dukungan modal, setiap risiko yang muncul dapat diselesaikan sehingga bank tidak dalam posisi yang berbahaya. Bank yang efisien juga memiliki keuntungan untuk menurunkan suku bunga kredit sehingga bank dapat meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Bank akan mendapatkan bantuan insentif apabila bank mampu menurunkan nilai BOPO dan NIM. Perbankan harus mendapatkan nilai NIM < 3% yang dapat mengakibatkan bunga juga turun menjadi 3% (Marta, 2016).

Dengan adanya MEA pada sektor keuangan dan perbankan pada tahun 2020, Bank Nasional diharapkan mampu menyusun strategi khusus dalam menghadapi ketatnya persaingan dengan Bank Asing. Strategi khusus tersebut dapat berupa penguatan modal maupun teknologi (Tambunan, 2015). Salah satu bank yang sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA 2020 adalah Bank Republik Indonesia (BRI). BRI bersiap untuk memperkuat permodalannya karena menurut peraturan Bank Indonesia, Perbankan harus menyediakan CAR minimal sebesar 14%. BRI pun akan melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan permodalannya. Salah satu upayanya adalah melakukan revaluasi aset. Direktur Keuangan BRI, Haru Koesmahargyo mengatakan bahwa revaluasi aset ini diharapkan mampu memperkuat permodalan BRI ke depannya karena revaluasi aset bisa meningkatkan rasio kecukupan modal BRI dari 20,41% pada semester I tahun 2015 menjadi

21,5%. Rasio permodalan yang bertambah diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyaluran kredit perseroan (Syafina dan Yudistira, 2015).

Dari penjelasan di atas, RGEC merupakan indikator penilaian yang digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan dan kinerja keuangan bank berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/ 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang terdiri dari *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings* atau rentabilitas, dan *Capital* atau permodalan terutama untuk melihat kesiapan dari Bank Nasional dan Bank Campuran Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan Bank Asing pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2020 mendatang.

Manurut SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, “Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi”. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur indikator *risk profile* adalah NPL dan LDR. “Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG”. Dalam penelitian ini, faktor *Good Corporate Governance* (GCG) dilihat dari nilai kompositnya. “Penilaian faktor rentabilitas (*earnings*) meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas”. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur indikator *earnings* adalah ROA, NIM, dan BOPO. Sedangkan, “Penilaian atas faktor permodalan (*capital*) meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko

tersebut”. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur indikator *capital* adalah CAR.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing di Indonesia Periode 2013-2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang didapat, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing di Indonesia periode 2013-2017 jika diukur dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing di Indonesia periode 2013-2017 jika diukur dengan *Non Performing Loan* (NPL)?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing di Indonesia periode 2013-2017 jika dilihat dari Nilai Komposit *Good Corporate Governance* (GCG)?
4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing di Indonesia periode 2013-2017 jika diukur dengan *Return On Assets* (ROA)?
5. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing di Indonesia periode 2013-2017 jika diukur dengan *Net Interest Margin* (NIM)?
6. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing di Indonesia periode 2013-2017 jika diukur dengan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)?

7. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing di Indonesia periode 2013-2017 jika diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis adanya perbedaan kinerja keuangan pada Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing di Indonesia periode 2013-2017 jika diukur dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).
2. Untuk menguji dan menganalisis adanya perbedaan kinerja keuangan pada Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing di Indonesia periode 2013-2017 jika diukur dengan *Non Performing Loan* (NPL).
3. Untuk menguji dan menganalisis adanya perbedaan kinerja keuangan pada Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing di Indonesia periode 2013-2017 jika dilihat dari Nilai Komposit *Good Corporate Governance* (GCG).
4. Untuk menguji dan menganalisis adanya perbedaan kinerja keuangan pada Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing di Indonesia periode 2013-2017 jika diukur dengan *Return On Assets* (ROA).
5. Untuk menguji dan menganalisis adanya perbedaan kinerja keuangan pada Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing di Indonesia periode 2013-2017 jika diukur dengan *Net Interest Margin* (NIM).
6. Untuk menguji dan menganalisis adanya perbedaan kinerja keuangan pada Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing di Indonesia periode 2013-2017 jika diukur dengan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
7. Untuk menguji dan menganalisis adanya perbedaan kinerja keuangan pada Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing di Indonesia periode 2013-2017 jika diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuannya, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Makalah ini bisa digunakan untuk studi lebih lanjut dalam membahas perbedaan kinerja keuangan pada Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing di Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat membantu manajemen perusahaan perbankan terutama Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing di Indonesia dalam memahami lebih jauh perbedaan kinerja keuangan perbankan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maupun setelah terjadinya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2020.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika untuk penulisan skripsi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis. model penelitian, dan hipotesis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 menjelaskan tentang desain penelitian, identifikasi, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 menjelaskan tentang hasil dan pembahasan penelitian berupa gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian dan intrepetasi hasil.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab 5 menjelaskan tentang kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang diberikan untuk perusahaan sampel maupun untuk penelitian selanjutnya.